

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan kegiatan pengendalian telah sesuai dengan penerapan standar PP Nomor 60 Tahun 2008. Di lingkungan pengendalian pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan pengendalian intern pemerintah relatif kecil. Hal ini terjadi karena lingkungan pengendalian di pemerintah Kota Kupang telah memiliki suasana yang kondusif dan sehat, sehingga menimbulkan perilaku positif pada pegawai.

Untuk penilaian risiko telah dilakukan karena memang untuk kegiatan harus menilai dan membuat skala prioritas yang telah diperhitungkan banyak hal terutama risiko yang terjadi dan di perhitungkan dalam wadah diskusi (*Focus Group Discussion*) di antara pegawai sebelum pelaksanaan sebuah kegiatan. Kegiatan pengendalian bisa dideteksi dari awal apakah berjalan dengan baik atau tidak, karena adanya pengawasan atas segala bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap instansi dimulai dari staf terendah sampai puncak pimpinan tertinggi. Sedangkan penerapan unsur keempat dan kelima dari SPIP yaitu informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern belum sesuai dengan standar PP Nomor 60 Tahun 2008. Informasi dan Komunikasi kurang efektif antara pimpinan dan bawahan sehingga belum tercapai dengan maksimal dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dari setiap bawahan. Begitu pula dengan unsur kelima yaitu Pemantauan Pengendalian Intern belum efektif walaupun ada proses pemantauan internal dari Inspektorat terhadap kebijakan akuntansi tetapi pemantauan tidak dilakukan secara otomatis dan tidak berkelanjutan sehingga pengamanan aset kurang efektif dan bisa terjadi pelanggaran dalam pengendalian intern.

Secara umum SPIP telah dilaksanakan tetapi prosesnya yang perlu diperbaiki dan menuntut semua pimpinan agar melibatkan semua staf secara aktif dalam setiap proses pelaksanaan program dan kegiatan agar hasilnya dapat lebih

berkualitas sehingga dampaknya bagi staf adalah peningkatan budaya kerja yang tinggi oleh karenanya implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pemimpin dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai dalam lingkup instansi pemerintahan agar upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku bisa di implementasikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing baik pimpinan maupun pegawai.

5.2 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran implementasi SPIP di Pemerintah Kota Kupang perlu ditingkatkan lagi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti berikut ini.

1. Perlu tindak lanjut dalam penerapan semua unsur SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, agar lebih efektif dan efisien supaya semua program yang sudah direncanakan bisa tercapai secara maksimal dalam lingkup pemerintahan Kota Kupang, sehingga dapat terciptanya *good governance*.
2. Diperlukan pelatihan yang memadai agar Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) agar dapat memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Sistem informasi dan komunikasi harus dikembangkan dan diperbaharui secara terus menerus agar mendukung kinerja manajerial dari tingkat pimpinan sampai entitas individu.
4. Memberikan perhatian lebih dalam hal penganggaran supaya tidak terjadi permasalahan seperti kurangnya jumlah anggaran ketika program sudah dilaksanakan.
5. Memberikan pemahaman lebih baik mengenai sistem pengendalian intern pemerintah kepada para pegawai sehingga pegawai mampu memahami esensi dari sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri.